Pencairan Insentif RSUD Tunggu Aturan

Bengkayang, BERKAT.

Belum dicairkannya dana insentif bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkayang, membuat para Pegawai RSUD resah. Sebab, biaya lembur dan jasa pelayanan tidak diberikan sebagaimana mestinya. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap motivasi kerja para pegawai.

Padahal, sebelumnya dana insentif diberikan dengan harapan agar bisa memotivasi kerja para pegawai, dengan diberikannya gaji atau pengasilan diluar gaji pokok.

Saat dihubungi melalui telepon seluler, Direktur RSUD Bengkayang, dr. Petrus Boli, M.Kes, S.Ps, mengungkapkan, penundaan pembayaran insentif para pegawai rumah sakit masih terkendala aturan. Jadi, segera di rampungkan dengan Pemerintah Daerah bagaimana aturan pelaksanaannya, karena tahun 2010 yang lalu



PETRUS BOLL

menjadi pertanyaan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) Republik Indonesia.

"Anggaran sudah turun sesuai dengan usulan pada anggaran perubahan dan proses pencairannyanya tinggal menunggu waktu karena sudah masuk di bendahara. Pencairannya tunggu aturan jelas lah," jelas Boli.

Jasa pelayanan, kata dia, berupa insentif bertujuan untuk memotivasi para pegawai yang sah menurut peraturan. Jadi tidak ada yang salah dengan diberikannya jasa pelayanan berupa insentif. "Dana itu harus diterima pegawai karena memang harus diterima oleh para pegawai rumah sakit." ujar Boli.

Sebagai contoh seorang dokter bedah diberikan jasa atas pekerjaannya karena sebagai bentuk ucapan teirma kasih atas kerja yang dilakukan. Ini juga terjadi bagi para pegawai yang melaksanakan kerja lembur atau piket pada malam hari. "Jadi tidak ada yang menyalahi dari pemberian dana insentif ini," tutur Boli.

Reaksi para pegawai rumah sakit disikapi keras oleh Ketua Lumbung Pemuda Peduli Kabupaten Bengkayang, Andri Proniko. Menurut Andri, ada yang tidak beres dengan adanya penundaan pembayaran insentif bagi para pegawai.

Menurutnya, pembayaran insentif hasil retribusi jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang melebihi batas yang ditentukan. Yang mana kelebihan terdapat sebesar Rp.924.466.199, dan realisasi honorarium pegawai honor tetap dan tidak tetap melebihi anggaran sebesar Rp.22.106.000.

"Ini tentunya patut dipertanyakan, karena kuat disinyalir adanya kesalahan prosedural. Kemudian realisasi anggaran penyediaan jasa administrasi atau teknis perkantoran yang melebihi dan belum didukung dengan bukti sebesar Rp.191.426.901, juga harus mendapat perhatian serius. Kita akan pertanyakan ini pada Direktur Rumah Sakit," papar Andri. (kr)